



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURANBUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA  
BUPATITEMANGGUNG,

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwak.Uan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.03/3-1/11/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2011, sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lmgkungan, Proptnsl Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Ifndang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
3. Ondang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;:a~m...han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851~

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai: mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 8) /

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung [Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana: Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupate~

- Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 21);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
  51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);
  53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Iamplran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang ndak terplsahkan dengan Peraturan Bupati Ini,

Pasal2

Rincian Penjabaran Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan dlcanturnkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Pasal3

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate~ ~ / Temanggung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal ~

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 April 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

SEKDA	4
ASISTEN -t- /-t+ / 111	4
KABAG HUKUM	4

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANGROCHMAN

SERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 11

PENGANGGARAN MENDAHULUI PEN ETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2011

NO	SKPO	KECIATAN	APBOTA 2011	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	JUMLAH		
1	OJNAS PENDIDIKAN	1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	0	22.171.155.000	22.171.155.000		
		2. Pendampingan OAK Pendidikan	0	2.380.793.205	2.380.793.205		
		3. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (OPPIP)	0	218.677.000	218.677.000		
		4. Pengembangan SMA/SMK	0	178.930.000	178.930.000		
		5. Pengadaan Alat bengkel SMK	0	101.825.000	101.825.000		
		6. Pendampingan Liantuan Gubernur Olkdas	0	63.250.000	63.250.000		
		7. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	24.625.700.000	432.100.000	25.057.800.000		
		8. Perbaikan/diknas	0	25.000.000	25.000.000		
		9. Pendidikan untuk semua (Ban-Cub) KEGIATAN BOS	40.000.000	(40.000.000)	0		
		10. Pendampingan kegiatan BOS	0	39.840.312.000	39.840.312.000		
		11. Pendampingan kegiatan BOS	0	325.345.000	325.345.000		
		2	OKK	1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, pustu, dan PKO	5.684.800.000	478.700.000	6.163.500.000
				2. Pendampingan OAK	653.752.000	136.496.000	790.248.000
				3. J-KT	2.000.000.000	0	2.000.000.000
4. Pemeriksaan kesehatan lingkungan	0			1.500.000	1.500.000		
5. Pendampingan rujukan maski [amkesmas]	0			3.000.000	3.000.000		
3	DPU			1. Rehabilitasi/pemeliharaan [alan	3.538.000.000	2.016.800.000	5.554.800.000
				2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	2.656.600.000	3.507.100.000	6.163.700.000
				3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum	708.200.000	192.100.000	900.300.000
				4. Sanimas	639.200.000	20.100.000	659.300.000
				5. OAK Perubahan dan pemukiman	0	1.614.200.000	1.614.200.000
				6. Pendampingan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	451.183.000	231.932.000	683.115.000
				7. Pendampingan Rehabilitasi/pemeliharaan [aringan irigasi]	310.886.000	403.316.000	714.202.000
				8. Pendampingan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum	758.031.000	26.894.000	784.925.000
				9. Pendampingan Sanimas	3.920.000	29.036.000	32.956.000
		10. Pendampingan OAK Perubahan dan pemukiman	0	209.846.000	209.846.000		
		11. DED Renovasi Masjid Agung Temanggung	0	9.000.000	9.000.000		
		12. DED Pemb. Gedung P. m. ud. a. d. a. n. Kebudayaan	0	169.000.000	169.000.000		
		13. Pendampingan Pamsimas	907.500.000	422.500.000	1.330.000.000		
		14. Perbaikan Jembatan Cipucung Cemawang	0	800.000.000	800.000.000		



NO	SKPD	ICEGIATAN	APBDA2011	BERTAMBAH/BERKURANGI	JUMLAH
1	1	JIS. Peningkatan jalan Kebraman-Muncar	0	450.000.000	450.000.000
		16. Perbaiki pengaman tebing Sungai Mojotengah Kedu	0	300.000.000	300.000.000
		17. Perbaiki sarana air bersih dan saluran air	0	400.000.000	400.000.000
		18. Peningkatan sarana air bersih dan saluran air	0	898.691.700	898.691.700
		19. Pendampingan Reklamasi Jalan Kledung	50.000.000	637.500.000	687.500.000
		20. Peningkatan 2 jembatan di jalan Krempong Karangseneng	0	465.000.000	465.000.000
		21. Kebersihan Kawasan Alot	0	597.500.000	597.500.000
		22. Penyusunan APBD Retribusi; Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan	0	20.200.000	20.200.000
		23. Pemeliharaan rutin jalan	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
		24. Perbaikan drainase di jalan Gajah Mada Kel. Sidorejo	0	150.000.000	150.000.000
		25. Perbaiki jembatan kalibruk pandemulyo Bulu	0	250.000.000	250.000.000
		26. Pengadaan 1 Truk Arm Roll dan 5 Kontainer	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4	BAP-PEDA	1.1. Pengkajian dan Evaluasi	0	295.000.000	295.000.000
		1.2. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi 2012-2014	0	50.000.000	50.000.000
		3. Pendampingan program perumahan/bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya	0	30.000.000	30.000.000
		4. Fasilitasi pengembangan pasar Agropolitan	0	30.000.000	30.000.000
		5. Pendidikan Untuk Semua	0	40.000.000	40.000.000
5	SHUKMIN F O	1. DAK Kelengkapan transportasi darat	6	3.600.000	243.600.000
		2. Peningkatan OAK Keselamatan transportasi darat	0	29.232.000	29.232.000
		3. Pengadaan Ilaser (MTSN Parakan, 2 RSU Jembataa Kali Kuas. PKU/SD Muh Bulu)	0	60.000.000	60.000.000
		4. Pemeliharaan dan operasional kendaraan MCAP	0	25.370.000	25.370.000
6	INSPEKTORA-T	1. Peningkatan anggaran dan serifikasi JFA	0	34.220.000	34.220.000
		2. Penyusunan PKJ	0	80.000.000	80.000.000
7	BKB-PP	1. Pengadaan sarpras Mobilitas	599.750.000	(49.793.300)	549.956.700
		2. Pengadaan sarpras-KB	300.050.000	58.537.900	359.387.900
		3. Pengadaan gedung alac kontrasepsi	0	126.355.400	126.355.400
		4. Pendampingan Pengadaan sarpras Mobilitas	68.244.000	1.195.000	69.439.000
		5. Pendampingan Pengadaan sarpras	35.325.000	17.936.700	53.261.700
		6. Pendampingan Pengadaan gedung kontrasepsi	0	20.000.000	20.000.000
		7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.000.000	20.000.000	25.000.000
8	Loisou K C APIC	1. Persiapan pelaksanaan anggaran	0	324.900.000	324.900.000
9	BLI	1. DAK Lingkungan Hidup	936.000.000	(500.000)	935.500.000
		2. Pendampingan DAK Lingkungan Hidup	101.640.000	0	101.640.000

NO	SKPD	KEGIATAN	APBD TA 2011	BBRTAMBAH/	JUMLAH
10	SATPOLPP	Pengendalian keamanan lingkungan	49.645.500	73.000.000	122.645.500
11	BAGIAN UMUM	1. Pengadaan kendaraan dinas roda 2	0	214.000.000	214.000.000
12	BAGIAN HUMAS	1. Pengisian materi pada vidiotron	0	15.000.000	15.000.000
13	BAGIAN PEKERJAAN EKONOMI	1. Penyelenggaraan pameran	0	135.000.000	135.000.000
14	DPPKAO	1. Pemeliharaan kendaraan operasional mantri pajak	0	17.400.000	17.400.000
		2. Pengelolaan BPHTB dan pajak Air Tanah	0	202.340.000	202.340.000
		3. Insentif pemungutan pajak daerah	0	787.189.673	787.189.673
15	BKO	1. Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	0	82.140.000	82.140.000
16	KKP	1. Pengembangan pangan lokal ubi kayu mekarmanik	0	420.945.000	420.945.000
17	DISTANBUH UT	1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	0	4.534.500	4.534.500
		2. Peningkatan sarpras usaha tani tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	4.900.000.000	287.100.000	5.187.100.000
		3. Pendampingan Peningkatan sarpras usaha tani tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	634.866.500	1.305.200	636.171.700
		4. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	824.200.000	187.500.000	1.011.700.000
		5. Pendampingan Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	244.000.000	70.406.000	314.406.000
		6. SLPIT Padi Unggul (Mikongga)	0	414.500.000	414.500.000
		7. Alat ekstrak tembakau	0	206.600.000	206.600.000
		8. Operasional lab kultur jaringan	0	30.000.000	30.000.000
		9. Promosi produk-produk pertanian	0	35.000.000	35.000.000
		10. Pengembangan padi organik	0	370.000.000	370.000.000
		11. Pengadaan pupuk organik SLPHT Tembakau	441.550.000	189.000.000	630.550.000
		12. Pengendalian bama nkus	0	200.000.000	200.000.000
18	DINAKAN	1. Pengembangan perikanan budidaya dan pemasaran basil perikanan	1.680.000.000	656.500.000	2.336.500.000
		2. Pendampingan Pengembangan perikanan budidaya dan pemasaran basil perikanan	1.500.000.000	128.820.000	1.628.820.000
19	BAPELUH	1. Peningkatan produksi jagung	0	497.800.000	497.800.000
		2. Pemberdayaan THI-TBPP	0	225.000.000	225.000.000
20	BAPELUM	1. Pengembangan perikanan budidaya dan pemasaran basil perikanan	0	1.250.000.000	1.250.000.000
		2. PNM Integras	5.887.000.000	1.250.000.000	7.137.000.000
		3. Fasilitasi	20.000.000	10.000.000	30.000.000
21	KPPT	1. cetak Plat	0	2.500.000	2.500.000

NO	SKPD	KEGIATAN	APBDA2011	BERTAMBAH/ rBERKUMINGI	JUMLAH
22	RSUD	1. Pemindahan dart polly Jama ke polly baru	0	95.649.850	95.649.850
		2. Pelebaran Jalan masuk Polly baru RSU	0	100.000.000	100.000.000
		3. Penunjang akreditasi pelayanan RSU	0	61.850.000	61.850.000
23	SETWAN	1. OED Renovasi Gedung DPRO	0	100.000.000	100.000.000
		IUMLAH	59.790.173.000	91.938.359,128	151.728.532,128

<b>SEKDA</b>	"V"
ASISTEN -t- /-H- / III	" / "
KABAG HUKU\	" / "

BUPATI TEMANGGUNG,



HAS IM AFAND~